

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM adalah sektor industri yang menopang perekonomian negara dewasa ini. Industri ini berkembang dengan pesat di Indonesia. Pada dasarnya, UMKM merupakan usaha menawarkan barang atau jasa yang dikelola oleh badan usaha ataupun perorangan dan sesuai dengan kriteria usaha dalam lingkup mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, UMKM adalah usaha yang mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp200.000.000,00 selain tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan maksimal Rp1.000.000.000,00 dalam satu tahun.

UMKM merupakan usaha yang membantu memajukan ekonomi Indonesia karena menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan devisa negara dengan cara memungut pajak badan usaha (Rudjito, 2003). Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia yang dikelola oleh badan usaha ataupun perorangan dengan kriteria kekayaan bersih maksimal Rp200.000.000,00 selain

tanah dan bangunan tempat usaha dan penjualan maksimal Rp1.000.000.000,00 dalam satu tahun.

2.1.2 Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro merupakan usaha yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan untuk memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 selain tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Penjualan maksimal Rp300.000.000,00 satu tahun.

Usaha kecil merupakan usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha selain anak atau cabang perusahaan, atau bergabung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

1. kekayaan bersih di atas Rp50.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00 selain tanah dan bangunan tempat usaha;
2. penjualan di atas Rp300.000.000,00 hingga Rp2.500.000.000,00.

Usaha menengah merupakan usaha ekonomi yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha selain anak atau cabang perusahaan atau bergabung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih di atas Rp500.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00 selain tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Penjualan di atas Rp2.500.000.000,00 hingga Rp50.000.000.000,00 dalam satu tahun.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan UMKM

Kegagalan bisnis disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kegagalan dalam mengelola keuangan usaha (Ali dan Kodrat, 2017). Dilansir dari *jurnal entrepreneur* terdapat hal yang perlu diperhatikan agar pengelolaan keuangan UMKM berjalan dengan baik.

1. Memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis.

Pelaku UMKM rata-rata menggunakan modal pribadi dalam memulai usahanya sehingga merasa tidak perlu melakukan pemisahan keuangan. Padahal pemisahan uang pribadi dan uang bisnis dapat menurunkan risiko keuangan yang mungkin terjadi.

2. Menganggarkan pengeluaran sebaik mungkin.

Pelaku UMKM harus menghindari pengeluaran yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha dan menentukan prioritas dalam menyusun anggaran keuangan.

3. Mencatat semua transaksi keuangan.

Pelaku UMKM wajib menyiapkan buku khusus yang terpisah dari buku keuangan pribadi. Pelaporan keuangan juga dibutuhkan untuk menentukan keputusan agar usaha dapat berkembang.

4. Mengontrol dan mengawasi arus kas.

Arus kas yang dikelola dengan baik akan membawa kestabilan dan potensi pengembangan bisnis yang baik. Seringkali pelaku usaha gagal mengelola arus kasnya dengan baik karena belum dilakukan pemisahan antara uang milik pribadi dengan bisnis.

5. Menyediakan dana cadangan.

Persiapan dana cadangan sangat dibutuhkan dalam menjalankan usaha untuk segala kemungkinan yang akan terjadi.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan perusahaan pada satu tahun atau satu periode akuntansi. Menurut Kasmir (2019), laporan keuangan merupakan laporan yang menampilkan keadaan keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Suteja (2018), laporan keuangan merupakan laporan posisi keuangan selama tahun tertentu. Dapat disimpulkan definisi laporan keuangan adalah catatan yang menyediakan informasi keuangan pada satu periode tertentu, yang telah disiapkan untuk pengguna sebagai pertimbangan dalam menentukan keputusan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan pengguna dalam menentukan keputusan. Menurut Hery (2015), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi sehubungan dengan sumber daya ekonomi.
2. Menyajikan informasi mengenai sumber daya ekonomi.
3. Memperkirakan kemungkinan perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Menginformasikan mengenai perubahan aset dan kewajiban.
5. Mengungkapkan informasi relevan.

2.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Terdapat kriteria yang harus dipenuhi dalam pembuatan laporan keuangan agar dapat memenuhi kualitas yang ingin dicapai dan memberikan informasi yang berguna. Kriteria laporan keuangan yang dipaparkan berdasarkan PSAK adalah sebagai berikut.

1. Relevan

Informasi dalam laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika dapat memengaruhi pengguna dalam mengambil keputusan dengan cara membantu evaluasi atas kejadian masa lalu, masa kini, atau masa mendatang. Adanya informasi yang tidak relevan dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan dapat dikatakan andal jika menggambarkan keadaan yang sebenarnya tanpa rekayasa. Hal ini berarti informasi harus bebas dari kesalahan material, disajikan secara jujur, dan dapat diverifikasi.

3. Materialitas

Informasi dipandang materialitas, jika terdapat kelalaian dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.

4. Penyajian Jujur

Informasi pada laporan keuangan tidak terlepas dari kesalahan penyajian yang dianggap kurang terbuka.

5. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi keuangan disajikan secara transparan, kejadian tersebut harus dicatat dan ditampilkan sesuai dengan substansi dan realita ekonomi.

6. Netralitas

Informasi ditujukan pada kebutuhan umum pengguna dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.

7. Pertimbangan Sehat

Dalam menyusun laporan keuangan terdapat ketidakpastian seperti perkiraan umur peralatan.

8. Kelengkapan

Informasi pada laporan keuangan harus utuh dalam batasan biaya dan materialitas agar bisa diandalkan.

9. Dapat Dibandingkan

Pengguna dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kinerja keuangan.

10. Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dimengerti oleh pengguna.

2.2.4 Jenis Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015, terdapat lima jenis laporan keuangan yaitu:

1. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi adalah pernyataan kinerja keuangan karena dapat menilai dan mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan antar periode dengan perusahaan yang sama, perusahaan lawan, atau perusahaan itu sendiri. Laporan laba rugi menyajikan tiga komponen utama yaitu pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi selama satu periode.

2. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan dengan menunjukkan peran serta dari pemegang saham, pergerakan ekuitas, dan saldo ekuitas pada akhir tahun.

3. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan menunjukkan jumlah saldo aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir tahun. Kekayaan bersih perusahaan dapat dihitung dengan cara menghapus kewajiban dari total aset.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas menunjukkan pergerakan kas. Terdapat tiga bagian dalam laporan ini yaitu arus kas dari kegiatan operasional, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan memuat isi laporan keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna mengetahui keadaan suatu perusahaan.

2.3 SAK EMKM

2.3.1 Pengertian SAK EMKM

UMKM memajukan perekonomian Indonesia karena menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan hal ini, pelaporan keuangan yang baik sangat dibutuhkan agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) mencoba untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan tersebut dengan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di tahun 2009. Namun, karena terbatasnya sumber daya manusia, DSAK IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada tahun 2016 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2018. Selain lebih sederhana, SAK EMKM juga memudahkan untuk mengetahui perkembangan di dunia usaha.

2.3.2 Kebijakan Akuntansi menurut SAK EMKM

Berdasarkan PSAK 25 (2019), definisi dari kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi menurut SAK EMKM terdiri atas konsep pengakuan, pengukuran dan asumsi dasar.

2.3.2.1 Konsep Pengakuan dan Pengukuran

1. Pengakuan

Pengakuan unsur laporan keuangan adalah proses pembentukan suatu akun dalam neraca atau laporan laba rugi. Menurut SAK EMKM bab 2 alinea 12 (2016), pengakuan suatu akun pada laporan keuangan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi masa depan suatu akun dalam neraca atau laporan laba rugi akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas. Dasar bukti pada kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan dapat menentukan ketidakpastian manfaat ekonomi di masa mendatang;
- b. Akun dalam neraca atau laporan laba rugi memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Apabila dalam suatu akun tidak dapat diukur secara andal, maka diperlukan estimasi untuk disajikan dalam laporan keuangan. Sebaliknya, jika pengukuran secara layak tidak dapat dilakukan, akun tersebut tidak dapat disajikan dan diakui dalam laporan keuangan.

2. Pengukuran

Menurut SAK EMKM bab 2 alinea 15 (2016), pengukuran adalah proses menentukan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran akun-akun yang tercantum pada laporan keuangan adalah biaya historis yang meliputi biaya historis aset dan biaya historis kewajiban. Biaya historis aset merupakan total kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Biaya historis kewajiban diukur sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima yang berasal dari aset sebagai bentuk penukar yang diperkirakan akan dibayarkan di masa mendatang untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

3. Informasi Posisi Keuangan

Informasi posisi keuangan berisi tentang informasi aset, liabilitas, dan ekuitas pada periode tertentu dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur dari informasi posisi keuangan adalah sebagai berikut.

a. Aset

Aset menurut SAK EMKM bab 2 alinea 2 (2016) adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Pengakuan aset adalah ketika suatu aset dapat memberikan manfaat ekonomi sehingga manfaat tersebut mengalir ke entitas dan memiliki biaya yang dapat diukur secara andal. Pengukuran suatu aset senilai dengan biaya historisnya, yaitu sebesar jumlah kas atau

setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut. Adapun jenis-jenis aset adalah sebagai berikut.

1) Aset lancar

Aset lancar merupakan aset yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi kas dan setara kas. Contoh: kas, surat berharga, piutang, dan lain- lain.

2) Aset tidak lancar

Aset tidak lancar merupakan aset yang tidak mudah dikonversikan menjadi kas dan setara kas. Contoh: tanah, bangunan, mesin, dan peralatan.

3) Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik. Contoh: paten, hak cipta, goodwill, merek dagang, dan lain-lain.

b. Liabilitas

Menurut SAK EMKM bab 2 alinea 2 (2016), liabilitas adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Dalam menyelesaikan kewajibannya melibatkan kas yang dibayarkan, aset yang diserahkan, jasa yang diberikan, dan/atau penggantian kewajiban lain. Pengakuan liabilitas adalah apabila sumber daya yang dikeluarkan mengandung manfaat ekonomi dan dapat dipastikan dalam penyelesaian kewajibannya di masa mendatang serta mempunyai biaya yang dapat diukur

dengan tepat. Pengukuran liabilitas sebesar biaya historisnya atau sebesar jumlah kas atau setara kas yang didapatkan atau yang akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas tersebut. Adapun jenis-jenis liabilitas adalah sebagai berikut.

1) Liabilitas lancar

Liabilitas lancar merupakan kewajiban yang harus dibayarkan segera mungkin atau paling lama satu tahun siklus atau periode pembukuan.

Contoh: utang dagang, utang bunga, utang gaji, dan lain-lain.

2) Liabilitas tidak lancar

Liabilitas tidak lancar adalah utang yang memiliki jangka waktu cukup lama atau lebih dari satu tahun atau siklus periode pembukuan. Contoh:

utang obligasi, utang hipotek, dan lain-lain.

c. Ekuitas

Menurut SAK EMKM bab 2 alinea 2 (2016), definisi dari ekuitas adalah hak residual seluruh aset setelah dikurangkan dengan seluruh liabilitasnya.

Ekuitas merupakan besaran dari hak pemilik entitas pada harta entitas.

Contoh: modal, saham, laba ditahan, dan lain-lain.

4. Informasi Kinerja Keuangan

Informasi kinerja keuangan berisi tentang informasi pendapatan dan beban selama periode akuntansi, dan dituangkan ke dalam laporan laba rugi. Unsur dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut.

a. Penghasilan

Penghasilan menurut SAK EMKM bab 2 alinea 8 (2016) adalah kenaikan ekuitas atau manfaat ekonomi selama periode akuntansi dengan bentuk arus kas masuk, seperti kenaikan aset atau penurunan liabilitas di luar dari kontribusi penanam modal. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh melalui kegiatan operasional entitas yang normal. Keuntungan merupakan penghasilan yang tidak memenuhi definisi dari pendapatan. Contoh dari penghasilan adalah pendapatan jasa atau usaha, keuntungan pelepasan aset, pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan lain-lain.

b. Beban

Beban menurut SAK EMKM bab 2 alinea 8 (2016) adalah penurunan ekuitas atau manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar seperti penurunan aset atau kenaikan liabilitas di luar distribusi kepada penanam modal. Beban dapat ditimbulkan dari beban yang timbul karena pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan serta kerugian. Contoh beban adalah beban pokok penjualan, beban administrasi, beban listrik, beban penyusutan, beban gaji, kerugian pelepasan aset, dan lain-lain.

2.3.2.2 Asumsi Dasar

Asumsi dasar yang digunakan oleh sebuah UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan melaksanakan praktik akuntansi menurut SAK EMKM bab 2 alinea 19-21 (2016) adalah sebagai berikut.

1. Dasar akrual

Dalam menyusun laporan keuangan, entitas menggunakan kebijakan dasar akrual. Dalam kebijakan ini, pengakuan seluruh akun dilakukan ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan pada masing-masing akun tersebut.

2. Kelangsungan usaha

Manajemen membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usaha saat menyusun laporan keuangan menggunakan SAK EMKM pada akhir periode pelaporan. Jika entitas tersebut tidak menyajikan laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha di luar alasan likuidasi entitas, penghentian operasi, atau tidak mempunyai alasan realistis lain kecuali melakukan hal tersebut, maka entitas harus mengungkapkan alasan terkait.

3. Konsep entitas bisnis

Entitas menyusun laporan keuangannya berdasarkan konsep entitas bisnis. Segala bentuk entitas seperti usaha perseorangan, badan usaha berbadan hukum, maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum harus dipisahkan secara jelas antara pemilik bisnis dengan entitas-entitas lain. Selain itu, transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan antara transaksi pemilik bisnis tersebut dengan transaksi entitas lainnya.

2.3.3 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

SAK EMKM mensyaratkan penyajian laporan keuangan dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan jujur, jelas, konsisten, patuh terhadap SAK EMKM yang dinyatakan secara eksplisit dalam catatan atas laporan keuangan, serta menyajikan

informasi dalam laporan keuangan secara komparatif antara periode sebelumnya dan periode tahun berjalan. Kecuali pada periode sebelumnya entitas belum atau tidak menyusun laporan keuangan.

Dalam SAK EMKM, terdapat 3 laporan keuangan yang wajib disusun, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos pos tertentu yang relevan

1. Laporan posisi keuangan menurut SAK EMKM

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Tidak terdapat format atau urutan tertentu untuk pos-pos yang disajikan, untuk pos-pos aset entitas dapat mengurutkannya berdasarkan tingkat likuiditas. Sedangkan untuk pos-pos liabilitas dapat diurutkan berdasarkan jatuh tempo.

a. Aset

Dalam SAK EMKM disebutkan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomik di masa mendatang. Klasifikasi aset dalam laporan keuangan menurut dibagi menjadi 2 kelompok yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Pengakuan aset dalam laporan keuangan dapat dilakukan ketika manfaat ekonomiknya di masa depan dapat dipastikan dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

b. Liabilitas

Dalam SAK EMKM disebutkan bahwa liabilitas adalah kewajiban entitas yang timbul akibat peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya menyebabkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Penyelesaian kewajiban dapat berupa pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, atau dengan cara kreditor membebaskan kewajiban tersebut. Liabilitas juga dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas dapat diakui apabila sejumlah pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan tersebut dapat diukur secara andal.

c. Ekuitas

Dalam SAK EMKM disebutkan bahwa ekuitas adalah hak residual atas aset setelah dikurangi liabilitas. Entitas menyajikan secara terpisah komponen ekuitas. Contoh komponen ekuitas antara lain adalah modal pemilik dan saldolaba.

2. Laporan laba rugi menurut SAK EMKM

Laporan laba rugi atau yang biasa juga disebut dengan laporan kinerja adalah laporan yang memuat informasi tentang penghasilan dan beban, selisih dari penghasilan dan beban tersebut akan menjadi laba atau rugi bersih yang dialami entitas selama periode pelaporan.

a. Penghasilan

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan yang dapat berupa arus masuk, kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Penghasilan diakui jika kenaikan manfaat ekonomik di masa depan telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Penghasilan terdiri dari pendapatan (revenue) dan keuntungan (gain). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul akibat aktivitas normal entitas, seperti penjualan, imbalan, bunga, royalti, dividen dan sewa. Sedangkan keuntungan adalah pos lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk dalam kategori pendapatan, misal keuntungan atas pelepasan aset.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan yang dapat berupa arus kas keluar, penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Beban diakui jika penurunan manfaat ekonomik di masa depan telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Beban terdiri dari beban yang timbul dari aktivitas normal entitas dan kerugian. Beban yang timbul dari aktivitas normal entitas misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Sedangkan kerugian adalah pos lain yang memenuhi definisi beban namun tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul dari aktivitas normal, misal kerugian atas pelepasan aset.

3. Catatan atas Laporan Keuangan menurut SAK EMKM

Informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi
- c. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting yang membantu pengguna memahami laporan keuangan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan EMKM berdasar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) sudah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat sebagaimana tersaji pada Tabel II.1.

Berdasarkan Tabel II.1, penelitian terdahulu yang dilakukan membahas kesesuaian penyusunan laporan keuangan UMKM terhadap SAK EMKM. Secara umum hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaporan keuangan obyek dengan SAK EMKM, baik pada penelitian yang dilakukan oleh Danar Pradana Akbar, Timotius Kurniawan Adhitama, maupun Ajeng Santika Putri.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan karya tulis ini adalah selain penulis menganalisis kesesuaian penyusunan laporan keuangan pada obyek yang

berbeda yaitu UMKM Toko Ani Collection penulis juga merancang penyusunan laporan keuangan Toko Ani Collection berdasarkan SAK EMKM.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Simpulan
1	Danar Pradana Akbar	Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM pada UMKM Djadjan Apel Malang.	UMKM Djadjan Apel Malang masih mengalami beberapa kendala dalam melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, UMKM Djadjan Apel Malang belum dapat menyusun laporan keuangan seperti yang disyaratkan dalam SAK EMKM.
2	Timotius Kurniawan Adhitama	Penyusunan Laporan Keuangan pada CV Raxsa Berdasarkan SAK EMKM.	CV Raxsa belum memenuhi ketentuan SAK EMKM karena pencatatan masih sederhana dan berbasis kas.
3	Ajeng Santika Putri	Evaluasi atas Laporan Keuangan UMKM Diana Motor dan Pembuatan Laporan Keuangan Diana Motor Berdasarkan SAK EMKM.	Praktik akuntansi UMKM Diana Motor belum sesuai dengan SAK EMKM. Pencatatan akuntansi yang dilakukan masih sederhana yaitu hanya memuat catatan pemasukan dan pengeluaran kas.

Sumber: diolah penulis